

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk membahas mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan visi dan cita-citanya sebagai negara poros maritim dunia. Poros maritim dunia sudah menjadi istilah yang populer dan semakin menarik dibicarakan oleh banyak pihak, termasuk di dalamnya media massa hingga masyarakat awam. Istilah tersebut identik dengan gagasan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo yang bercita-cita untuk menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia “Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya sebagaimana semboyan kita di masa lalu bisa kembali” (Muhamad, 2014). Pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 tersebut bermaksud bahwa Presiden Jokowi ingin menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang aman untuk berbagai aktivitas laut. Maka dari itu, keselamatan dan kesejahteraan dari transportasi laut yang berada di wilayah perairan Indonesia akan terjaga baik itu bagi pelaku usaha ataupun masyarakat biasa.

Melihat kembali fakta sejarah, Indonesia pernah berjaya dalam bidang kemaritiman. Terdapat beberapa kerajaan yang dikenal sebagai penguasa maritim contohnya Kerajaan Sriwijaya, Demak, dan Majapahit. Bahkan, jejak dominasi kerajaan-kerajaan tersebut bisa dilihat hingga benua Afrika, yaitu Madagaskar. Kata maritim sendiri memiliki makna navigasi yang berasal dari bahasa Inggris. Definisi lain dari kata maritim yaitu kekuasaan terhadap laut. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia kata maritim didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan laut seperti perdagangan di laut atau pelayaran. Singkat kata, kata maritim berperan sebagai kata sifat sedangkan kata benda yang menggambarkannya adalah kelautan. Dengan begitu, negara yang digambarkan sebagai negara yang menguasai laut, termasuk memanfaatkan sumber daya dan menjaga keamanannya, akan lebih cocok dengan frasa negara maritim.

Wilayah perairan Indonesia menempati sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki Indonesia mengakibatkan Presiden Joko Widodo semakin semangat dalam mewujudkan cita-citanya dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia Indonesia yang kaya dengan sumber daya lautnya dan kejayaan masa lampaunya telah memperkenalkan diri dalam perdagangan secara internasional dengan berbagai negara, termasuk di dalamnya Tiongkok, Arab, India, bahkan hingga Eropa. Internasionalisasi yang dilakukan dalam bidang perdagangan tersebut tentu sangat menonjolkan bidang kemaritiman Indonesia mengingat lebih dari 45% spesies ikan berada di wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya ikan, luasnya garis pantai yang dimiliki Indonesia menjadikan daerah pesisir Indonesia juga kaya akan sumber dayanya seperti mangrove dan berbagai macam terumbu karang.

Kekayaan yang dimiliki Indonesia ini memang menjadi aset yang besar bagi warga negara Indonesia. Namun, disaat yang sama Indonesia harus memberikan perhatian yang ekstra dalam memantau aktivitas terkait kekayaannya. Keberadaan sumber daya yang melimpah tersebut juga mengundang para pelaku kejahatan, dalam konteks ini *illegal fishing*. Konflik *illegal fishing*, atau dalam istilah lain *illegal, unreported, and unregulated fishiug (IUU Fishing)*, telah menjadi permasalahan yang cukup lama mengakar di Indonesia, mengingat luasnya daerah perairan yang dimiliki lengkap dengan kekayaan di dalamnya (Praswadi, 2012). Para pelaku kejahatan ini menjadi contoh nyata bahwa tingginya kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairannya. Semenjak Presiden Joko Widodo menyatakan ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, beliau sudah mulai mempraktekkan *smart maritime diplomacy*. Yang dimaksud dengan *smart maritime diplomacy* disini adalah penggabungan antara *soft maritime diplomacy* yang didasarkan pada kerja sama dan persuasi dengan *hard maritime diplomacy* yang lebih berfokus pada penghukuman tegas atas pelaku kejahatan (Rijal, 2020)

Sebelum bisa menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus terlebih dahulu menjadi negara maritim. Pada titik sekarang ini, Indonesia merupakan negara kepulauan, belum bisa disebut sebagai negara maritim. Secara geografis, Indonesia termasuk ke dalam negara kepulauan, namun bukan negara maritim (Prasetyo, 2019). Perlu dipahami bahwa negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan sumber daya lautnya dan menjaga keamanan dari wilayah perairan tersebut. Sebuah negara, bahkan yang tidak memiliki wilayah perairan yang luas, bisa disebut negara

maritim jika negara tersebut memiliki kemampuan, teknologi, dan pengetahuan untuk memanfaatkan lautnya secara maksimal. Oleh karena itu, terdapat banyak negara kepulauan yang tidak tergolong sebagai negara maritim hanya karena belum mampu memanfaatkan sumber daya laut yang sudah termasuk dalam daerah kekuasaannya. Sebaliknya, beberapa negara tidak memiliki wilayah perairan yang luas tetapi mampu memanfaatkan lautnya secara maksimal seperti Singapura sebagai contohnya. Guna mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia, terdapat beberapa tantangan, salah satunya merubah paradigma. Sudut pandang lama hanya memfokuskan desa-desa nelayan sebagai pusat eksploitasi sumber daya laut, namun sebagai negara maritim infrastruktur antar pulau dan sepanjang garis pantai menjadi hal yang harus dikembangkan sebaik mungkin. Pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk mempermudah transportasi antar pulau sehingga mobilitas dalam distribusi sumber daya bisa meningkat dan menjadi lebih efektif (Prakoso & Sianturi, 2019)

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah perairan menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan. Di saat yang sama, keamanan dari wilayah perairan menjadi faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keamanan dan kesejahteraan perairan yang dikuasai menjadi kunci lain suatu negara bisa disebut sebagai negara maritim (Nurdiana, 2018). Mengikuti pembangunan infrastruktur antar pulau dan sepanjang garis pantai sebelumnya, terdapat beberapa infrastruktur lain yang juga termasuk dalam implementasi konsep poros maritim dunia. Salah satu program pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan tol laut yang mana telah berjalan sejak tahun 2017 lalu. Pembangunan tol laut ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan regional antarwilayah timur dan barat Indonesia dengan harapan akan mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lainnya (Saragi, Mamahit, & Prasety, 2018). Tidak hanya itu, pembangunan tol laut ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja transportasi laut melalui peningkatan kualitas jaringan pelayaran baik itu domestik maupun internasional. Disaat yang sama, pembangunan ini juga berperan sebagai penunjang peran transportasi laut Indonesia yang sekarang masih belum optimal sehingga ke depannya bisa menjadi titik keunggulan kompetitif bangsa. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara maritim bukan hanya sekedar dari lokasi geografisnya, namun juga secara politik, ekonomi, dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia bercita-cita untuk menjadi poros maritim dunia yang mana akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil Indonesia ke depannya demi memenuhi visi tersebut. Berikut ini adalah rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penulisan ini:

· “Bagaimana pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia tahun 2014-2023?”

C. Kerangka Berpikir

C1. Smart Maritime Diplomacy

Argumen utama dari teori *smart maritime diplomacy* ini adalah bahwa diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan perairannya mengintegrasikan dua pendekatan diplomasi maritim. Pertama, upaya diplomasi dalam bentuk *soft maritime diplomacy* melalui kerja sama dan persuasi. Kedua, upaya diplomasi dalam bentuk *hard maritime diplomacy* melalui Tindakan koersif dalam bentuk kebijakan tegas terhadap pelanggaran *illegal fishing*. Penerapan dua bentuk diplomasi maritim pada saat yang bersamaan tersebut disebut sebagai *smart maritime diplomacy*. Meminjam istilah *smart power* oleh Joseph Nye, *smart maritime diplomacy* dimaknai sebagai bentuk integrasi antara kekuatan atau pendekatan *soft* dan *hard* Indonesia dalam diplomasi maritim untuk mewujudkan visi sebagai negara poros maritim dunia.

Secara umum, diplomasi merupakan manajemen dalam hubungan antar negara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional sebagai pelaksanaan dari politik luar negerinya. Konsep diplomasi kemudian mengalami perluasan, baik dalam hal isu maupun aktor, yang selanjutnya melahirkan berbagai bentuk dan jenis diplomasi, salah satunya adalah diplomasi maritim (*maritime diplomacy*). Secara sederhana, diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Perlu dipahami bahwa diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Jika umumnya diplomasi

melibatkan diplomat sebagai representasi negara, diplomasi maritim tidak hanya melibatkan *policy maker* (aktor negara). Diplomasi maritim dapat melibatkan analisis dan akademisi untuk mengkaji mengenai tren dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global.

Mengikuti penjelasan tersebut, diplomasi maritim dikategorikan ke dalam tiga betuk, yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif. Pertama, diplomasi maritim kooperatif meliputi keterlibatan berbagai aktor dalam berbagai aktivitas dengan negara lain. Diplomasi maritim yang kooperatif mensyaratkan kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kemaritiman, meliputi pertukaran personel, program pendidikan, pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk *confidence-building*. Kedua, diplomasi maritim persuasif berbeda dengan kooperatif dalam hal kolaborasi antar aktor. Tujuan dari diplomasi persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi secara persuasif pihak lain terhadap kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Cara yang dapat dilakukan, salah satunya, adalah "*showing the flag*". *Showing the flag* maksudnya adalah dengan mengerahkan komponen kekuatan maritim dengan mengibarkan bendera (seperti kapal patroli berbendera negara) sebagai penanda eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritimnya. Ketiga, diplomasi maritim koersif atau disebut juga dengan diplomasi kapal meriam. Dalam hal ini, diplomasi maritim dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer atau *maritime forces* (seperti angkatan laut dengan perangkat-perangkatnya) untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Negara, melalui personel militernya, kemudian akan melakukan penembakan, penyerangan, penyergapan, dan lainnya terhadap setiap pihak yang dipandang melakukan pelanggaran di teritorial lautnya.

Dalam prakteknya, perubahan dari karakter kepentingan nasional ini menyebabkan penggunaan instrumen persuasif non-destruktif seperti diplomasi meningkat. Keberadaan diplomasi sebagai instrumen yang populer juga menjadi lonjakan yang besar bagi praktek diplomasi itu sendiri. Sebagai instrumen yang sering digunakan, maka diplomasi sendiri mengalami perkembangan yang pesat hingga memunculkan berbagai ragam yang menarik dan

bersifat lebih spesifik. Tidak hanya pada ragam, diplomasi berkembang begitu pesat hingga dilakukan oleh hampir semua aktor hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional terus berkembang beriringan dengan konsep *power* (Rosyidin, 2010). Adanya berbagai konflik di berbagai belahan dunia seperti konflik antar negara, konflik etnis, pelanggaran hak asasi manusia, telah menempatkan makna keamanan di posisi yang dinamis. Keamanan nasional merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasionalnya (Haikal, 2010)

C2. Geopolitik

Ilmu Geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan, serta kemampuan untuk Ketahanan Nasional. Pada hakikatnya geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah suatu negara, berdasarkan semboyan negara tersebut yang mana mencakup, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional. Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas kepulauan yang memang berbeda dengan pemahaman kepulauan di negara-negara Barat pada umumnya. Pada negara barat wilayah perairan di negaranya dipandang sebagai pemisah antar pulau, sedangkan di Indonesia wilayah perairan lebih berperan sebagai penghubung antar pulau.

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia erat hubungannya dengan jejak sejarah Indonesia dan lokasinya yang sangat mendukung untuk menjadi negara poros maritim dunia. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan studi geopolitik yang mana merupakan studi mengenai politik dan hubungan internasional yang juga didasarkan pada unsur geografi negara atau aktor tersebut. Studi dan praktek geopolitik di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan dahulu, lebih tepatnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, geopolitik Indonesia membahas mengenai strategi untuk Indonesia agar mampu mempertahankan kepentingannya dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, demografis, keamanan, bahkan geografis itu sendiri. Singkat

kata, ilmu geopolitik merupakan pengetahuan yang membahas mengenai potensi, kemampuan dan kekuatan suatu bangsa yang mana disandarkan pada lokasi geografis negara tersebut (Nehe, 2022). Dengan memanfaatkan ilmu geografis dengan semaksimal mungkin, maka suatu negara ataupun aktor lain akan mampu mencapai kepentingannya dengan lebih matang dan efektif.

Keberadaan ilmu geopolitik menjadi krusial mengingat cita-cita Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia sangat erat hubungannya dengan faktor geografinya. Namun, untuk mencapai visi tersebut diperlukan strategi dan pemanfaatan ilmu geopolitik disaat yang sama. Dengan kata lain, diperlukan geostrategis yang matang dan mampu dilaksanakan dengan baik. Geostrategi sendiri pada dasarnya sangat bergantung oleh kemampuan negara pelakunya dalam mengelola dan memanfaatkan Trigata Alamiah negara tersebut. Trigata Alamiah merupakan unsur dari suatu negara yang terdiri dari geografi atau wilayah, sumber daya alam, dan kependudukan. Jika suatu negara mampu mengelola Trigata Alamiah ini dengan baik, maka negara tersebut akan memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal Pancagatra Sosial (Suradinata, 2001). Pancagatra Sosial sendiri merupakan unsur-unsur yang menggerakkan suatu negara yang terdiri dari unsur ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

D. Hipotesis

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan kerangka berpikir pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia yakni; dengan melakukan pembangunan khususnya infrastruktur tol laut, peningkatan hubungan diplomasi antar negara tetangga, dan penegakan hukum pidana kelautan. Meskipun telah melakukan berbagai program dan kebijakan tersebut, Indonesia masih belum mencapai tujuan untuk menjadi poros maritim dunia.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: mengetahui upaya dan kebijakan apa saja yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan visinya menjadi negara poros maritim dunia.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan *library research* atau penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Sehingga, dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh secara valid melalui baik media cetak maupun digital, yaitu dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, makalah ilmiah, dan artikel ilmiah. Data juga diperoleh melalui situs-situs resmi dan berita yang terdapat di internet serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “Upaya Indonesia Mewujudkan Visi Menjadi Negara Poros Maritim Dunia (2014-2023)” ini akan dibahas dengan batasan dari tahun 2014 hingga 2023. Dalam kurun waktu ini, menjadi masa di mana presiden Indonesia mulai mengemukakan cita-citanya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia yang berawal dari pernyataan beliau pada pidatonya di tahun 2014 lalu. Mengingat masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam dua tahun ke depan, maka batas jangkauan penelitian ini akan berakhir hingga tahun ini untuk melihat kebijakan apa saja yang telah diambil dalam upayanya mewujudkan visi tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bab, antara lain:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai visi dan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dan implementasinya:

A. Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

- i. Latar Belakang Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
- ii. Esensi Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

B. Implementasi Kebijakan

- i. Pembangunan Infrastruktur Tol Laut
- ii. Peningkatan Hubungan Diplomasi Antar Negara
- iii. Penegakan Hukum Pidana Kelautan

C. Analisis Pencapaian Kebijakan

Bab III merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi bab yang telah dipaparkan.